

PILKADA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan pilkada kabupaten/kota di dua daerah yaitu Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Setiap daerah mengajukan dan menerima anggaran pengawasan yang berbeda. Kota Tebing Tinggi mengajukan anggaran pengawasan sebesar Rp 6.235.304.000,00 dan disetujui sebesar Rp 3,9 miliar. Begitu pula, Kabupaten Tapanuli Tengah menerima anggaran pengawasan yang lebih rendah dibandingkan pengajuan. Anggaran yang disetujui sebesar Rp 8.998.445.000,00 dari pengajuan anggaran pengawasan sebesar Rp 11.927.654.000,00. Selain anggaran pengawasan yang lebih rendah, Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami keterlambatan pencairan anggaran pengawasan. Kondisi tersebut berbeda dengan Kota Tebing Tinggi yang berhasil menerima anggaran pengawasan tepat waktu.

Jumlah pengawas yang bertugas pada pilkada di kedua daerah tersebut memiliki komposisi yang berbeda. Di Kota Tebing Tinggi personil pengawas berjumlah 289 orang yang terdiri dari 218 pengawas laki-laki dan 124 orang pengawas perempuan. Sedangkan komposisi antara pengawas laki-laki dan perempuan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri 772 orang pengawas laki-laki dan 59 orang jumlah pengawas perempuan.

Pada tahapan kampanye Pilkada di Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Tapanuli Tengah, tidak ditemukan dugaan pelanggaran baik terkait isu SARA maupun kampanye di masa tenang. Berbanding terbalik dengan tahapan pemungutan suara yang menunjukkan bahwa terdapat 13.078 Form C6 yang tidak terdistribusikan. Bahkan, di Kabupaten Tapanuli Tengah, Form C6 yang tidak terdistribusikan mencapai 49.424 buah. Hasil pengawasan memperlihatkan, terdapat dua pelanggaran etik yang muncul dalam pilkada Kota Tebing Tinggi. Sementara, Pilkada di Kabupaten Tapanuli Tengah terdapat pelanggaran administrasi yang berjumlah tujuh kasus.

PROVINSI SUMATERA UTARA

Kota Tebing Tinggi



DATA PEMILH

DPT	Laki-laki	52.195
	Perempuan	54.745
DPTb	Laki-laki	391
	Perempuan	457
DPPh	Laki-laki	12
	Perempuan	11

Jumlah Pemilih Pemula	3.552
Jumlah Pemilih Disabilitas	94
Jumlah Pemilih TMS	0



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	0	1	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS			
0			
Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
1	0	1	0
Jumlah Pason Petahana			
1			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 6.235.304.000,-

Yang Disetujui

Rp 3.900.000.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

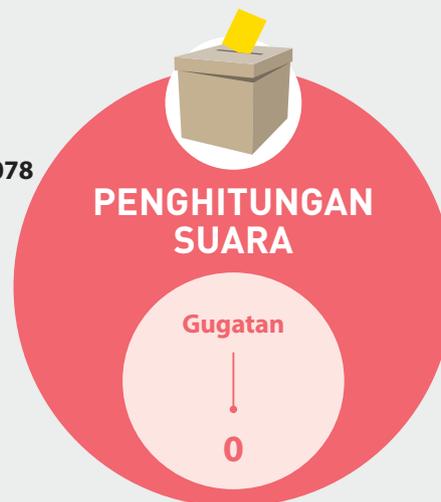
DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
26.658	32.339	391	457	12	11	27.061	32.807	58.798	1.070	47	55.80%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	13.078
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
289	0	0	3	0	13	2	30	5	172	117



Pencalonan (Tahapan) 0

SENGKETA

Hasil 0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 1

Pelanggaran Pidana 0

Pelanggaran Etik 2

Pelanggaran Hukum Lainnya 0



PROVINSI SUMATERA UTARA

Tapanuli Tengah



DATA PEMILH

DPT	Laki-laki	114.659
	Perempuan	116.116
DPTb	Laki-laki	1.684
	Perempuan	2.253
DPPh	Laki-laki	108
	Perempuan	80

Jumlah Pemilih Pemula	2.008
Jumlah Pemilih Disabilitas	191
Jumlah Pemilih TMS	0



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
4	0	4	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS			
2			
Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	2	4	1
Jumlah Paslon Petahana			
0			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 11.927.654.000,-

Yang Disetujui

Rp 8.998.445.000,-

Ketepatan Waktu

0

Keterlambatan Waktu

Terlambat

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
67.472	73.647	1.508	2.109	101	77	69.081	75.833	142.531	2.383	217	62.60%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	49.424
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
596	0	0	3	0	48	12	168	47	553	0



Pencalonan (Tahapan)	2
SENGKETA	
Hasil	0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	7	Pelanggaran Pidana	0	Pelanggaran Etik	0	Pelanggaran Hukum Lainnya	0
--------------------------	---	--------------------	---	------------------	---	---------------------------	---

PILKADA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Pilkada Serentak Tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan di dua daerah, yaitu Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pilkada di Kota Payakumbuh diikuti oleh tiga pasangan calon, salah satunya adalah calon perseorangan. Sedangkan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, diikuti oleh dua pasangan calon dan tidak ada pasangan calon perseorangan.

Anggaran pengawasan di kedua daerah ini dicairkan tepat waktu, baik itu dari proses penandatanganan NPHD maupun pencairan anggarannya. Pada Pilkada Kota Payakumbuh, anggaran pengawasan yang disetujui sebesar Rp2.916.400.500,00 dari pengajuan sebesar Rp3.263.861.100,00. Sedangkan, pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai, anggaran yang disetujui sebesar Rp 3.397.571.300,00 dari pengajuan sebesar Rp 4.205.836.100,00.

Untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada di kedua daerah tersebut, Bawaslu membentuk jajaran pengawas dari level Kabupaten/Kota hingga Pengawas TPS. Tercatat ada 580 personil pengawas yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pengawasan Pilkada kedua daerah tersebut. Pada Pilkada di Kota Payakumbuh terdapat 276 personil pengawas yang meliputi 34 orang perempuan dan 242 orang laki-laki. Sedangkan, jumlah pengawas di Kabupaten Mentawai berjumlah 304 personil yang 17 diantaranya merupakan perempuan.

Hasil pengawasan sepanjang pelaksanaan Pilkada Kota Payakumbuh, ada 5 temuan dan laporan dugaan kasus Politik Uang. Sedangkan di Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai ditemukan satu laporan terkait dugaan kasus politik uang. Tidak ada laporan maupun temuan terkait isu SARA, penggunaan fasilitas negara, keterlibatan PNS dan kampanye hitam di kedua daerah tersebut. Sedangkan pada tahapan

pemungutan suara, tercatat empat pelanggaran ditemukan di Pilkada Kota Payakumbuh dan dua pelanggaran pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Terkait sengketa, hanya ada satu sengketa di kedua daerah tersebut yaitu sengketa hasil di Pilkada Kota Payakumbuh. Pasangan Suwandel Muchtar dan Fitrial Bachri mengajukan gugatan hasil kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Namun MK menyatakan tidak memenuhi gugatan dari pasangan tersebut dikarenakan selisih suara paslon tersebut kurang dari ketentuan maksimal 2% dari pasangan calon lain.

Panwas Kota Payakumbuh menemukan setidaknya ada dua pelanggaran administrasi dan dua pelanggaran pidana. Sedangkan terkait dengan dugaan pelanggaran etik, di Kabupaten Mentawai ataupun Kota Payakumbuh tercatat ada satu laporan pelanggaran.



PROVINSI SUMATERA BARAT

Kota Payakumbuh



DATA PEMILH

DPT	Laki-laki	41.281
	Perempuan	43.048
DPTb	Laki-laki	261
	Perempuan	274
DPPh	Laki-laki	35
	Perempuan	21

Jumlah Pemilih Pemula	2.778
Jumlah Pemilih Disabilitas	87
Jumlah Pemilih TMS	0



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
3	0	3	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS			
0			
Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	1	0	0
Jumlah Paslon Petahana			
2			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 3.623.861.100,-

Yang Disetujui

Rp 2.916.400.050,-

Ketepatan Waktu

Tepat Waktu

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
25.526	31.881	261	274	34	21	25.821	32.176	57.178	820	61	68.30%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	4



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	5
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
276	0	0	1	2	9	6	22	26	210	0



Pencalonan (Tahapan)	0
SENGKETA	
Hasil	1

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	2	Pelanggaran Pidana	2	Pelanggaran Etik	1	Pelanggaran Hukum Lainnya	0
--------------------------	---	--------------------	---	------------------	---	---------------------------	---



PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepulauan Mentawai



DATA PEMILH

DPT	Laki-laki	27.591
	Perempuan	24.845
DPTb	Laki-laki	641
	Perempuan	636
DPPh	Laki-laki	218
	Perempuan	120

Jumlah Pemilih Pemula	1.647
Jumlah Pemilih Disabilitas	33
Jumlah Pemilih TMS	0



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2	0	2	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS			
0			
Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	0	0	0
Jumlah Paslon Petahana			
2			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 4.205.836.100,-

Yang Disetujui

Rp 3.397.571.300,-

Ketepatan Waktu

Tepat Waktu

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
21.132	19.247	641	636	218	120	21.991	20.003	41.587	407	22	78.40%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	1
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	2



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	1
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
304	0	0	2	1	18	12	39	4	228	0



Pencalonan (Tahapan) 0

SENGKETA

Hasil 0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 0

Pelanggaran Pidana 0

Pelanggaran Etik 1

Pelanggaran Hukum Lainnya 0

PILKADA DI PROVINSI RIAU

Pada Pilkada Serentak 2017, di Provinsi Riau diselenggarakan dua Pilkada Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Anggaran pengawasan yang diajukan oleh Panwas Kabupaten Kampar sebesar Rp 10.174.602.000,00 dan yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp 7,5 miliar. Sementara, Panwas Kota Pekanbaru mengajukan anggaran sebesar Rp 6.996.852.000,00, dan pengajuan tersebut dipenuhi seluruhnya oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Proses pengajuan hingga pencairan anggaran pengawasan, baik di Kabupaten Kampar maupun Kota Pekanbaru berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

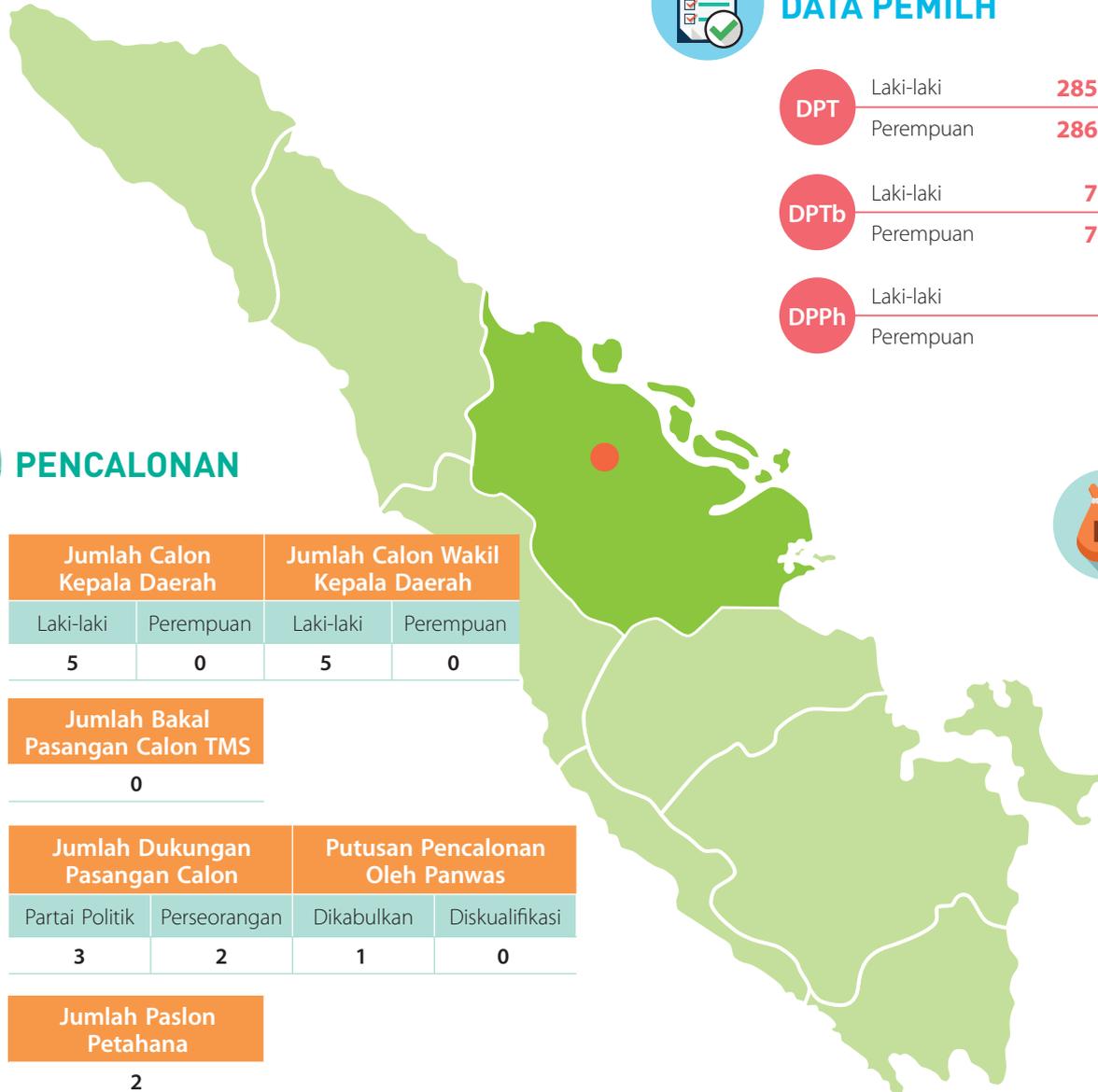
Dalam pilkada Kabupaten Kampar, jumlah Pengawas sebanyak 358 orang dengan jumlah pengawas laki-laki sebanyak 316 orang dan pengawas perempuan sebanyak 42 orang. Sedangkan pada pilkada Kota Pekanbaru, jumlah pengawas sebanyak 1.893 orang yang terdiri dari 1.205 personil laki-laki dan 688 personil perempuan. Dari laporan hasil pengawasan, ditemukan enam dugaan politik uang dan kampanye pada masa tenang. Selain itu, pengawas berhasil menemukan empat dugaan mobilisasi PNS dan satu dugaan kampanye hitam dalam tahapan kampanye. Tanpa kecuali, dalam tahapan pemungutan suara juga ditemukan dua kasus pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi di pilkada Kabupaten Kampar dapat digolongkan atas empat pelanggaran administrasi, sepuluh pelanggaran pidana, tiga pelanggaran etik, dan empat pelanggaran hukum lainnya.

Berbeda dengan Kabupaten Kampar, berdasarkan hasil pengawasan pilkada Kota Pekanbaru 2017, pelanggaran terbesar yang terjadi di Kota Pekanbaru adalah pelanggaran administrasi dan pelanggaran hukum lainnya. Di samping itu, pengawas menemukan satu kasus sengketa dalam tahapan pencalonan dan satu gugatan sengketa hasil. Selain itu, ditemukan juga sejumlah dugaan pelanggaran yang meliputi lima dugaan mobilisasi PNS, satu dugaan terkait kampanye hitam, politik uang, dan kampanye pada masa tenang.



PROVINSI RIAU

Kota Pekanbaru



DATA PEMILH

DPT	Laki-laki	285.370
	Perempuan	286.660
DPTb	Laki-laki	7.035
	Perempuan	7.225
DPPh	Laki-laki	344
	Perempuan	411

Jumlah Pemilih Pemula	17.601
Jumlah Pemilih Disabilitas	191
Jumlah Pemilih TMS	0



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
5	0	5	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS			
0			
Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
3	2	1	0
Jumlah Paslon Petahana			
2			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 6.996.852.000,-

Yang Disetujui

Rp 6.996.852.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat (38 hari)

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPH		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
13.032	149.454	6.421	6.61	331	401	137.072	156.465	285.787	7.75	141	51.90%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

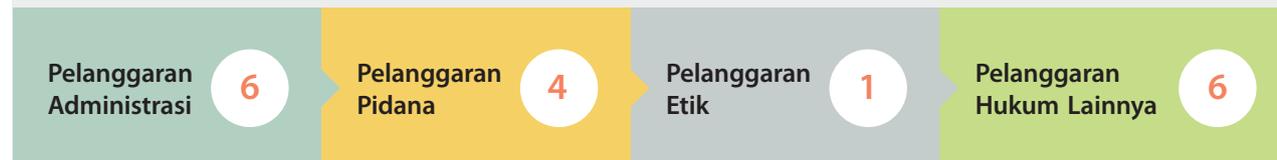
Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	5
Kampanye Jahat (Hitam)	1
Politik Uang	1
Kampanye Masa Tenang	1

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1893	0	0	3	0	31	5	42	16	1129	667



PELANGGARAN





PROVINSI RIAU

Kampar



DATA PEMILH

DPT	Laki-laki	244.820
	Perempuan	236.150
DPTb	Laki-laki	8.706
	Perempuan	8.296
DPPh	Laki-laki	507
	Perempuan	223

Jumlah Pemilih Pemula	17.562
Jumlah Pemilih Disabilitas	180
Jumlah Pemilih TMS	0



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
6	0	6	0

Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS	1
---------------------------------	---

Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
3	3	0	0

Jumlah Paslon Petahana	0
------------------------	---



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 10.174.602.000,-

Yang Disetujui

Rp 7.500.000.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat (32 hari)

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
156.036	162.957	7.032	6.586	467	194	163.535	169.737	327.248	6.024	61	68.90%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	2

Pemungutan Suara Ulang	
Rekomendasi Panwas	Putusan MK
2	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	4
Kampanye Jahat (Hitam)	1
Politik Uang	6
Kampanye Masa Tenang	6

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
358	0	0	3	0	59	4	232	18	22	20



Pencalonan (Tahapan)	1
SENGKETA	
Hasil	0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	4	Pelanggaran Pidana	10	Pelanggaran Etik	3	Pelanggaran Hukum Lainnya	4
--------------------------	---	--------------------	----	------------------	---	---------------------------	---

PILKADA DI PROVINSI JAMBI

Pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Provinsi Jambi, terdapat tiga daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tebo. Pilkada 2017 di Kabupaten Muaro Jambi diikuti oleh 4 pasangan calon, salah satu pasangan calonnya dari jalur perseorangan. Dari sejumlah pasangan calon tersebut, terdapat satu calon kepala daerah perempuan. Sedangkan di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo, masing-masing diikuti oleh dua pasangan calon dari pengusung partai politik. Pada masing-masing Kabupaten tersebut terdapat satu pasangan calon petahana. Semua pasangan calon di dua Kabupaten tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Kabupaten Muaro Jambi memiliki jumlah pemilih 98.127 laki-laki dan 97.875 perempuan dengan suara sah sebanyak 191.642 dari partisipasi sebesar 73,1%. Kabupaten Sarolangun memiliki jumlah pemilih 66.220 laki-laki dan 68.652 perempuan dengan suara sah sebanyak 132.437 dari partisipasi sebesar 69,9%. Di Kabupaten Tebo terdapat jumlah pemilih 83.603 laki-laki dan 83.070 perempuan dengan suara sah sebanyak 164.226 dari partisipasi sebesar 75,5%.

Anggaran pengawasan yang digunakan dalam Pilkada tahun 2017 di Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp 4.498.302.500,00. Sedangkan di Kabupaten Sarolangun sebesar Rp 5.679.288.000,00 dan di Kabupaten Tebo sebesar Rp 3.700.284.000,00. Keseluruhan anggaran pengawasan yang diajukan Panwaslu Kabupaten/Kota disetujui sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah masing-masing dan berhasil dicairkan tepat waktu.

Jajaran pengawas pemilu yang ada di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 534 personil yang terdiri 354 laki-laki dan 180 perempuan. Di Kabupaten Sarolangun personis pengawas sebanyak 677 personil dengan komposisi 523 laki-laki dan 154 perempuan. Sedangkan di

Kabupaten Tebo terdapat 827 pengawas pemilu dengan 812 laki-laki dan 15 perempuan.

Hasil pengawasan pada tahapan masa kampanye di Kabupaten Muaro Jambi tidak terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu. Di Kabupaten Sarolangun terdapat 1 temuan dugaan penggunaan fasilitas negara; 5 temuan dan 1 laporan dugaan kampanye hitam; dan 1 temuan dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang. Sedangkan di Kabupaten Tebo terdapat 4 temuan dan 1 laporan dugaan kampanye hitam.

Proses penanganan dugaan pelanggaran oleh pengawas pemilu di Kabupaten Muaro Jambi telah menghasilkan 1 penindakan pelanggaran administrasi dan 2 pelanggaran pidana. Pengawasan pemilu di Kabupaten Sarolangun membuahkan hasil penindakan 66 pelanggaran administrasi, 8 pelanggaran pidana dan 5 pelanggaran kode etik pemilu. Sedangkan di Kabupaten Tebo, Panitia Pengawas Pemilu menindak 25 pelanggaran administrasi, 9 pelanggaran pidana, 1 pelanggaran etik dan 3 pelanggaran hukum lainnya.

Selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat permasalahan dan dugaan pelanggaran di ketiga Kabupaten tersebut. Namun pada akhir perhitungan suara terdapat gugatan sengketa hasil pemilihan di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo.



PROVINSI JAMBI

Muaro Jambi



DATA PEMILH

DPT	Laki-laki	136.548
	Perempuan	129.984
DPTb	Laki-laki	1.317
	Perempuan	1.321
DPPh	Laki-laki	66
	Perempuan	25

Jumlah Pemilih Pemula	7.315
Jumlah Pemilih Disabilitas	216
Jumlah Pemilih TMS	0



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
3	1	4	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS			
0			
Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
3	1	0	0
Jumlah Pason Petahana			
0			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 4.498.302.500,-

Yang Disetujui

Rp 4.498.302.500,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
96.755	96.536	1.306	1.314	66	25	98.127	97.875	191.642	436	50	73.10%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
534	0	0	3	0	30	3	128	22	193	155



Pencalonan (Tahapan) 0

SENGKETA

Hasil 0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 1

Pelanggaran Pidana 2

Pelanggaran Etik 0

Pelanggaran Hukum Lainnya 0



PROVINSI JAMBI

Sarolangun



DATA PEMILH

DPT	Laki-laki	96.108
	Perempuan	94.832
DPTb	Laki-laki	1.570
	Perempuan	1.586
DPPh	Laki-laki	126
	Perempuan	39

Jumlah Pemilih Pemula	5.184
Jumlah Pemilih Disabilitas	86
Jumlah Pemilih TMS	0



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2	0	2	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS			
0			
Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	0	0	0
Jumlah Paslon Petahana			
1			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 5.679.288.000,-

Yang Disetujui

Rp 5.679.288.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
64.528	67.03	1.306	1.584	123	38	6.622	68.652	132.437	2.435	76	69.90%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	1 (T)
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	5(T) 1 (L)
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	1 (T)

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
677	0	0	2	1	28	2	159	13	334	138



Pencalonan (Tahapan)	0
SENGKETA	
Hasil	1

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	66	Pelanggaran Pidana	8	Pelanggaran Etik	5	Pelanggaran Hukum Lainnya	0
--------------------------	----	--------------------	---	------------------	---	---------------------------	---



PROVINSI JAMBI

Tebo



DATA PEMILH

DPT	Laki-laki	112.137
	Perempuan	108.105
DPTb	Laki-laki	1.765
	Perempuan	1.667
DPPh	Laki-laki	102
	Perempuan	46

Jumlah Pemilih Pemula	6.195
Jumlah Pemilih Disabilitas	360
Jumlah Pemilih TMS	0



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2	0	2	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS			
0			
Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	0	0	0
Jumlah Pason Petahana			
1			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 3.700.284.000,-

Yang Disetujui

Rp 3.700.284.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPH		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
81.759	81.379	1.757	1.662	87	29	83.603	83.07	164.226	2.447	79	75.50%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	4 (T) 1 (L)
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
827	0	0	3	0	36	0	98	15	675	0



Pencalonan (Tahapan) 0

SENGKETA

Hasil 1

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 25

Pelanggaran Pidana 9

Pelanggaran Etik 1

Pelanggaran Hukum Lainnya 3

PILKADA DI SUMATRA SELATAN

Pada Pilkada serentak tahun 2017, hanya dilaksanakan satu Pilkada saja di Provinsi Sumatera Selatan yaitu di Kabupaten Musi Banyuasin. Anggaran pengawasan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk Panwas Kabupaten Musi Banyuasin sama nilainya dengan jumlah yang diajukan yakni sebesar Rp 16.000.000.000,00. Sedangkan waktu pengajuan anggaran pengawasan hingga disetujui berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dalam pilkada Kabupaten Musi Banyuasin, jumlah personel pengawas yang direkrut sebanyak 1745 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 1474 orang dan perempuan sebanyak 271 orang. Sedangkan berdasarkan hasil pengawasan dalam pilkada Kabupaten Musi Banyuasin, terdapat satu dugaan pelanggaran terkait dengan penggunaan fasilitas negara dalam tahapan kampanye dan satu mobilisasi PNS dalam kampanye. Berdasarkan pada dugaan pelanggaran tersebut, pengawas pemilu mencatat adanya satu pelanggaran administrasi pemilu. Sementara itu, berkaitan dengan proses pemungutan suara, ditemukan permasalahan tidak didistribusikannya Form C6 sebanyak 27.486.



PROVINSI SUMATERA SELATAN

Musi Banyuasin



DATA PEMILH

DPT	Laki-laki	236.418
	Perempuan	228.491
DPTb	Laki-laki	1.592
	Perempuan	1.448
DPPh	Laki-laki	316
	Perempuan	125

Jumlah Pemilih Pemula	14.206
Jumlah Pemilih Disabilitas	128
Jumlah Pemilih TMS	0



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2	0	2	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS			
0			
Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
1	1	0	0
Jumlah Pason Petahana			
1			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan	Rp 16.000.000.000,-
Yang Disetujui	Rp 16.000.000.000,-

Ketepatan Waktu
Tepat

Keterlambatan Waktu
0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
134.740	137.954	1.552	1.439	316	125	136.608	139.518	271.044	5.082	101	59.00%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	27.486
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	1
Mobilisasi PNS	1
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.748	3	0	3	0	41	1	211	29	1.219	241



Pencalonan (Tahapan)	0
SENGKETA	
Hasil	0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	1	Pelanggaran Pidana	0	Pelanggaran Etik	0	Pelanggaran Hukum Lainnya	0
--------------------------	---	--------------------	---	------------------	---	---------------------------	---

PILKADA DI PROVINSI BENGKULU

Terdapat satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2017. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bengkulu Tengah yang berhasil menerima anggaran pengawasan sebesar Rp 3.750.000.000,00. Pencairan anggaran pengawasan tersebut berhasil dilaksanakan dengan tepat waktu. Personil pengawas yang dikerahkan mulai dari tingkat panwaslu Kabupaten sampai tingkat pengawas TPS berjumlah 296 orang. Jumlah pengawas laki-laki dan pengawas perempuan mempunyai selisih yang cukup besar. Terhitung sebanyak 208 pengawas laki-laki yang bertugas dalam pilkada Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebaliknya, pengawas perempuan hanya berjumlah 88 orang.

Pada tahapan kampanye di Kabupaten Bengkulu Tengah tercatat sejumlah dugaan pelanggaran yang meliputi penggunaan fasilitas negara, mobilisasi PNS, dan politik uang. Dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara dan mobilisasi PNS berjumlah tiga dugaan kasus. Sementara, dugaan pelanggaran politik uang terdapat satu dugaan kasus. Pada tahapan pemungutan suara, hasil pengawasan

menunjukkan bahwa terjadi kekurangan surat suara sebesar 1.933 lembar. Sedangkan, kerusakan logistik dan pelanggaran dalam proses pemungutan suara tidak ditemukan dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Merujuk kepada hasil pengawasan, ditemukan tiga kasus sengketa dalam tahapan pencalonan dan satu gugatan sengketa hasil di Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu, dari laporan hasil pengawasan terdapat 13 kasus pelanggaran pidana di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian, disusul pula dengan adanya pelanggaran administrasi, pelanggaran etik dan pelanggaran hukum lainnya yang masing-masing berjumlah dua kasus.



PROVINSI BENGKULU

Bengkulu Tengah



DATA PEMILH

DPT	Laki-laki	40.782
	Perempuan	39.598
DPTb	Laki-laki	111
	Perempuan	109
DPPh	Laki-laki	1
	Perempuan	0

Jumlah Pemilih Pemula	2.730
Jumlah Pemilih Disabilitas	152
Jumlah Pemilih TMS	5



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
5	0	5	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS			
4			
Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
1	4	0	0
Jumlah Pason Petahana			
2			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 4.500.000.000,-

Yang Disetujui

Rp 3.750.000.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPH		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
30.281	30.703	111	109	1	0	30.393	30.812	57.888	3.317	85	77.30%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	1,933
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	3
Mobilisasi PNS	3
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	6
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
296	2	1	3	0	24	6	105	38	74	43



Pencalonan (Tahapan)	3
SENGKETA	
Hasil	1

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	9	Pelanggaran Pidana	13	Pelanggaran Etik	2	Pelanggaran Hukum Lainnya	2
--------------------------	---	--------------------	----	------------------	---	---------------------------	---

PILKADA DI BANGKA BELITUNG

Provinsi Bangka Belitung menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak tahun 2017. Anggaran pengawasan yang digunakan untuk mensukseskan perhelatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tersebut sebesar Rp 35.764.855.000,00 dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp 41.371.995.000,00. Meskipun anggaran pengawasan yang dialokasikan tidak sesuai dengan nilai anggaran yang diajukan, anggaran pengawasan tersebut dapat dicairkan tepat waktu.

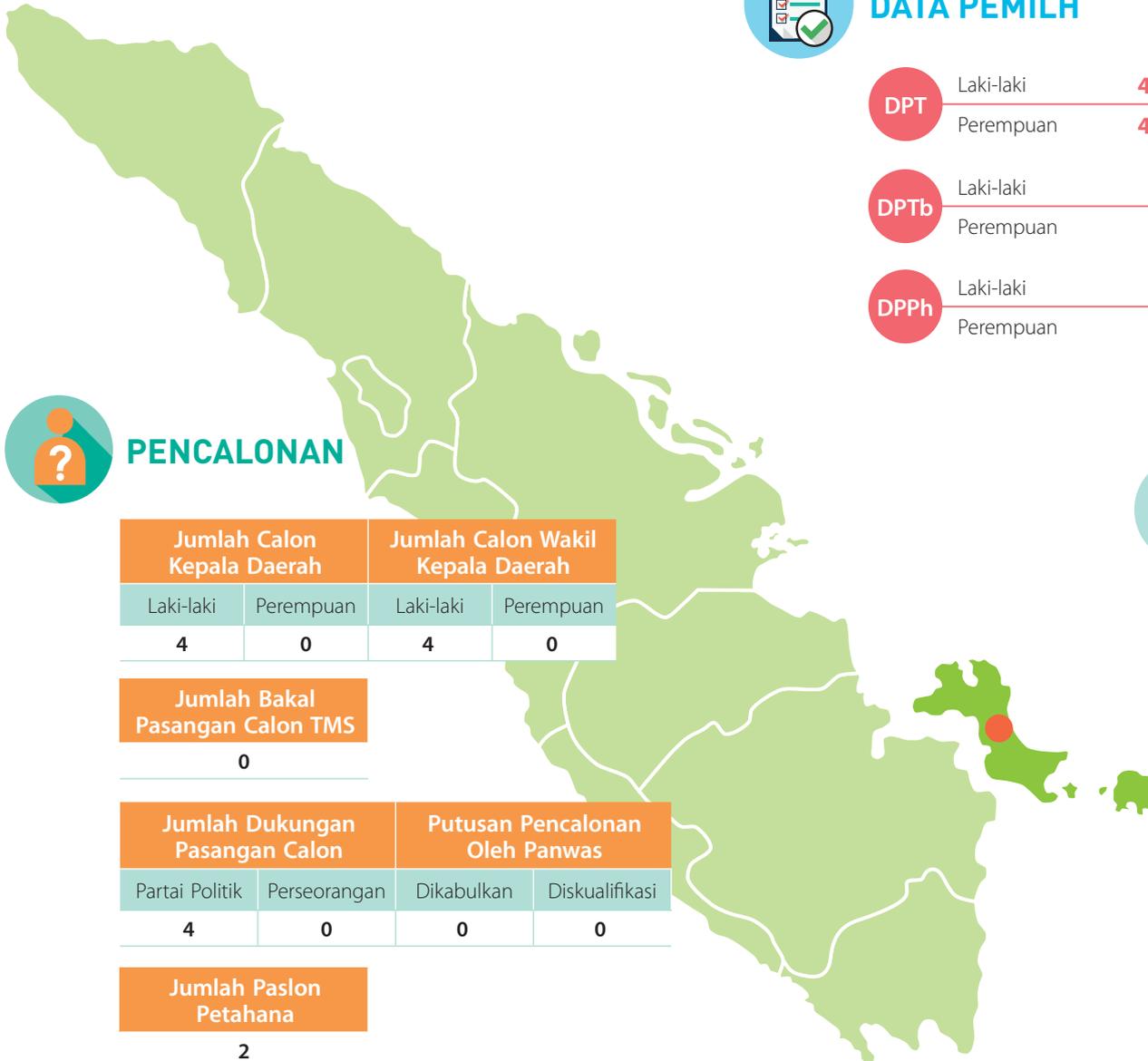
Hasil pengawasan selama masa kampanye di Pilkada Bangka Belitung 2017 terdapat 1 dugaan pelanggaran politik uang dan 52 dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang. Dalam proses pemungutan suara terdapat beberapa catatan penyelenggaraan pemilu yang perlu diperhatikan antara lain terdapat 40.004 formulir C6 yang belum

terdistribusi; kekurangan 1.002 surat suara; 686 kerusakan logistik; dan 43 dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara. Dari proses penindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut, tercatat sebanyak 11 pelanggaran administrasi dan 2 pelanggaran kode etik. Namun dari keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat rekomendasi pengawas pemilu untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang maupun sengketa terhadap hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung tahun 2017.



PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

Pilgub Babel



DATA PEMILH

DPT	Laki-laki	467.736
	Perempuan	448.117
DPTb	Laki-laki	2.973
	Perempuan	3.066
DPPH	Laki-laki	815
	Perempuan	531

Jumlah Pemilih Pemula	28.328
Jumlah Pemilih Disabilitas	1.012
Jumlah Pemilih TMS	13.714



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
4	0	4	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS			
0			
Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
4	0	0	0
Jumlah Paslon Petahana			
2			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 41.371.995.000,-

Yang Disetujui

Rp 41.371.995.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
274.615	284.712	2.969	3.055	704	490	278.288	288.257	548.071	18.474	1.002	61.37%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	40.004
Kekurangan Surat Suara	1.002
Kerusakan Logistik	686
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	43



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	1
Kampanye Masa Tenang	52

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
860	2	1	18	3	122	19	319	73	275	28



Pencalonan (Tahapan) 0

SENGKETA

Hasil 0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 11

Pelanggaran Pidana 0

Pelanggaran Etik 2

Pelanggaran Hukum Lainnya 0

PILKADA DI LAMPUNG

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 di Provinsi Lampung terjadi di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Tulang Bawang. Pengajuan anggaran pengawasan di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar Rp 6.409.889.000,00. Namun, anggaran pengawasan yang disetujui sebesar Rp 5.036.186.000,00. Sementara, anggaran pengawasan yang diterima Kabupaten Pringsewu berjumlah Rp 5,5 miliar dari pengajuan anggaran pengawasan sebesar Rp 5.738.384.000,00. Kabupaten Mesujihanya mendapatkan anggaran pengawasan sebesar Rp 4.991.826.000,00 dari pengajuan anggaran Rp 5.831.334.000,00. Demikian pula, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tulang Bawang menerima anggaran pengawasan yang lebih rendah daripada yang diajukan. Kedua kabupaten tersebut menerima anggaran sebesar Rp 7.416.000.000,00 (Kabupaten Lampung Barat) dan Rp 7,6 miliar (Kabupaten Tulang Bawang). Anggaran pengawasan kelima kabupaten tersebut berhasil dicairkan tepat waktu.

Pengawas pilkada mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat TPS di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencapai 677 orang. Kabupaten Pringsewu menjadi kabupaten dengan jumlah pengawas terbanyak di Provinsi Lampung, yaitu sebesar 982 orang. Sementara, Kabupaten Mesuji merupakan kabupaten yang memiliki jumlah pengawas tersedikit dengan jumlah sebesar 396 orang. Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tulang Bawang masing-masing memiliki pengawas sebesar 717 personil dan 899 personil.

Berdasarkan hasil pengawasan dalam tahapan kampanye, terdapat satu dugaan politik uang di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan, dugaan isu SARA tidak ditemukan dalam lima kabupaten tersebut. Terkait dugaan kampanye pada masa tenang, berhasil ditemukan dua dugaan pelanggaran di Kabupaten Pringsewu dan satu dugaan di Kabupaten Lampung Barat. Tiga kabupaten lainnya tidak ditemukan dugaan kampanye pada masa tenang. Pada tahapan pemungutan suara, pelanggaran yang kerap kali terjadi adalah Form C6 yang tidak terdistribusikan. Tercatat 9.819 kasus pelanggaran tersebut di Kabupaten Tulang Bawang Barat, 48.939 kasus di Kabupaten Pringsewu, 22.952 kasus di Kabupaten Mesuji, 31.061 kasus di Kabupaten Lampung Barat, dan 41.048 kasus di Kabupaten Tulang Bawang. Dari lima kabupaten di Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2017, Kabupaten Tulang Bawang menjadi kabupaten yang tercatat mengalami pelanggaran administrasi terbanyak, yaitu 8 kasus. Sementara, pelanggaran pidana paling banyak terjadi di Kabupaten Tulang Bawang dengan jumlah pelanggaran sebesar 29 kasus. Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Barat memiliki jumlah pelanggaran etik yang sama yakni 3 kasus. Kabupaten Lampung Barat juga mengalami pelanggaran hukum lainnya terbanyak dalam Pilkada Serentak 2017 dengan jumlah pelanggaran sebesar 5 kasus.



PROVINSI LAMPUNG

Tulang Bawang Barat



DATA PEMILH

DPT	Laki-laki	100.813
	Perempuan	96.450
DPTb	Laki-laki	715
	Perempuan	916
DPPh	Laki-laki	36
	Perempuan	13

Jumlah Pemilih Pemula	10.743
Jumlah Pemilih Disabilitas	50
Jumlah Pemilih TMS	11.145



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	0	1	0

Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS	0
---------------------------------	---

Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
1	0	0	0

Jumlah Paslon Petahana	2
------------------------	---



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 6.409.889.000,-

Yang Disetujui

Rp 5.036.186.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
100.813	96.450	715	916	36	13	89.841	86.536	174.408	1.969	21	88.40%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	9.819
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
677	0	0	3	0	27	0	90	6	392	159



Pencalonan (Tahapan) 0

SENGKETA

Hasil 0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 8

Pelanggaran Pidana 7

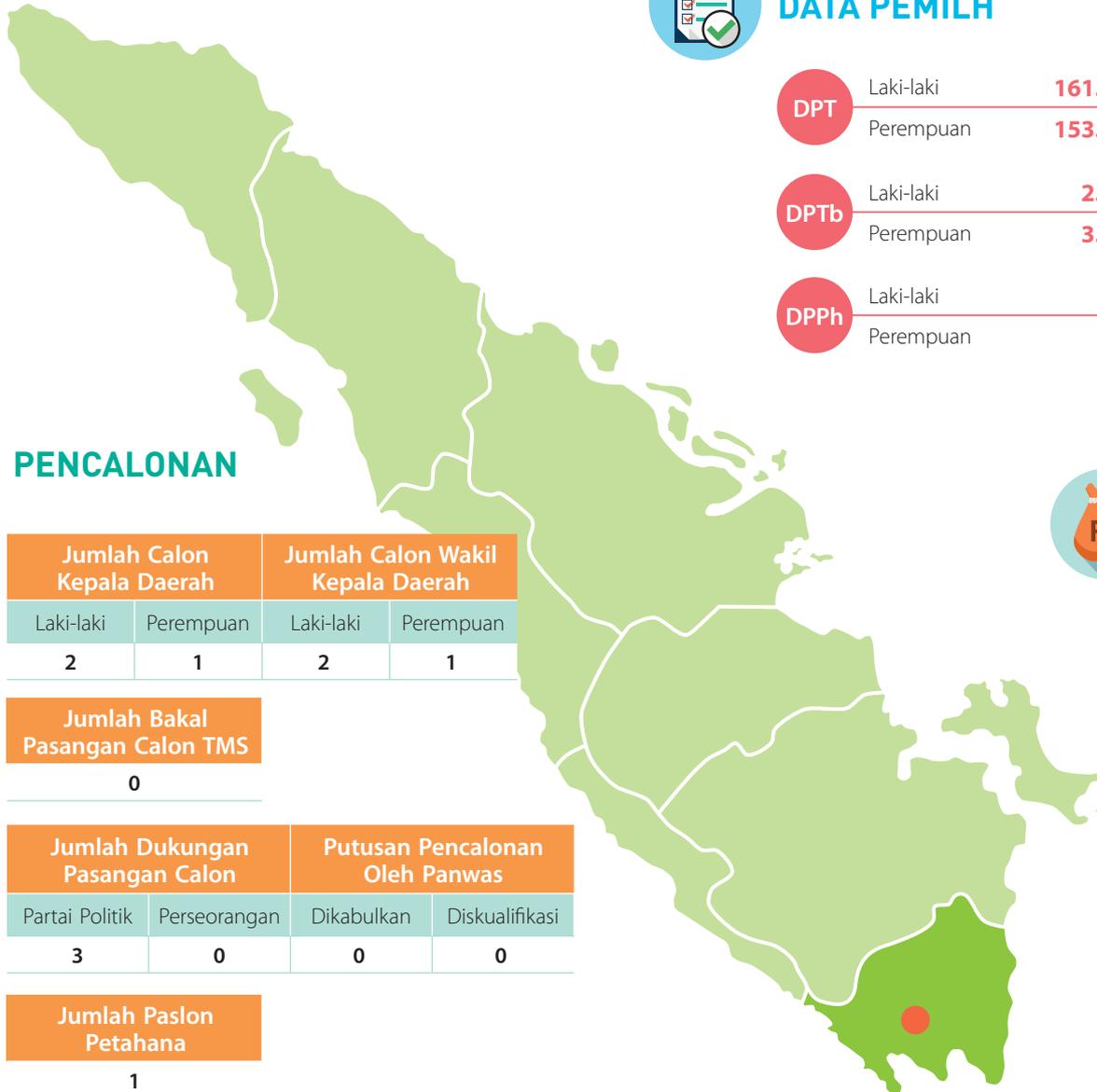
Pelanggaran Etik 1

Pelanggaran Hukum Lainnya 1



PROVINSI LAMPUNG

Pringsewu



DATA PEMILH

DPT	Laki-laki	161.220
	Perempuan	153.830
DPTb	Laki-laki	2.701
	Perempuan	3.374
DPPh	Laki-laki	217
	Perempuan	38

Jumlah Pemilih Pemula	9.068
Jumlah Pemilih Disabilitas	167
Jumlah Pemilih TMS	15.256



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2	1	2	1
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS			
0			
Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
3	0	0	0
Jumlah Paslon Petahana			
1			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 5.738.384.000,-

Yang Disetujui

Rp 5.500.000.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
161.217	153.829	2.701	3.374	217	38	164.135	157.241	214.807	3.217	40	68.80%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	48.939
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	1
Kampanye Masa Tenang	2

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
982	0	0	3	0	27	0	128	3	619	202



Pencalonan (Tahapan) 0

SENGKETA

Hasil 0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 4

Pelanggaran Pidana 7

Pelanggaran Etik 0

Pelanggaran Hukum Lainnya 0



PROVINSI LAMPUNG

Mesuji



DATA PEMILH

DPT	Laki-laki	73.795
	Perempuan	67.839
DPTb	Laki-laki	2.169
	Perempuan	2.207
DPPh	Laki-laki	112
	Perempuan	44

Jumlah Pemilih Pemula	5.141
Jumlah Pemilih Disabilitas	57
Jumlah Pemilih TMS	10.764



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	1	2	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS			
0			
Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	0	0	0
Jumlah Paslon Petahana			
1			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 5.813.334.000,-

Yang Disetujui

Rp 4.991.826.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

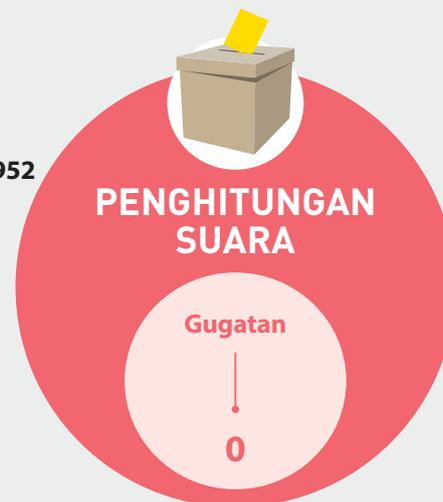
DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
73.795	67.839	2.169	2.207	112	44	76.076	70.090	105.441	1.315	48	72.60%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	22.952
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
396	0	0	3	0	20	1	102	3	235	32



Pencalonan (Tahapan) 0

SENGKETA

Hasil 0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 4

Pelanggaran Pidana 5

Pelanggaran Etik 3

Pelanggaran Hukum Lainnya 1



PROVINSI LAMPUNG

Lampung Barat



DATA PEMILH

DPT	Laki-laki	112.830
	Perempuan	101.820
DPTb	Laki-laki	2.070
	Perempuan	2.183
DPPh	Laki-laki	567
	Perempuan	211

Jumlah Pemilih Pemula	6.109
Jumlah Pemilih Disabilitas	119
Jumlah Pemilih TMS	2.557



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2	0	2	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS			
0			
Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	0	0	0
Jumlah Paslon Petahana			
0			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 8.160.609.000,-

Yang Disetujui

Rp 7.416.000.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
112.829	101.819	2.070	283	567	211	115.466	102.313	161.594	1.849	39	75.40%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	31.061
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	1
Kampanye Masa Tenang	0

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
717	0	0	3	0	21	24	126	10	460	73



Pencalonan (Tahapan)	0
SENGKETA	
Hasil	0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	6	Pelanggaran Pidana	12	Pelanggaran Etik	3	Pelanggaran Hukum Lainnya	5
--------------------------	---	--------------------	----	------------------	---	---------------------------	---



PROVINSI LAMPUNG

Tulang Bawang



DATA PEMILH

DPT	Laki-laki	154.760
	Perempuan	142.500
DPTb	Laki-laki	4.052
	Perempuan	4.054
DPPh	Laki-laki	2.678
	Perempuan	2.110

Jumlah Pemilih Pemula	8.718
Jumlah Pemilih Disabilitas	29
Jumlah Pemilih TMS	10.835



PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2	1	2	1
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS			
0			
Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	1	0	0
Jumlah Paslon Petahana			
2			



ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

Rp 8.460.119.000,-

Yang Disetujui

Rp 7.600.000.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0

DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
154.756	142.495	4.052	4.054	2.678	2.110	161.486	148.659	197.697	2.596	23	66.20%



PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	41.048
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	1

REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
899	0	0	2	1	44	1	138	13	618	82



Pencalonan (Tahapan) 0

SENGKETA

Hasil 0

PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 7

Pelanggaran Pidana 29

Pelanggaran Etik 0

Pelanggaran Hukum Lainnya 0

